

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Rismah Syamsul¹

Abstrak

Rismah Syamsul, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman 2010. Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dosen pembimbing pertama, dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sos,M.Si selaku Dosen pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Narasumber terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Pengelola Program Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari data yang didapat, dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian yang diperoleh secara keseluruhan bahwa Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dapat dilaksanakan secara maksimal baik itu dalam hal pencegahan maupun pengobatan/rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi dan survei langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, kemudian belum adanya Klinik VCT sehingga upaya pencegahan secara dini dan pendistribusian obat belum mampu dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci : Dinas Kesehatan, HIV/AIDS.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rismah.syam92@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Arah pembangunan Indonesia diantaranya adalah mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada penyembuhan penderita, berangsur-angsur berkembang kearah upaya kesehatan yang menyeluruh dan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut, diperlukan kebijakan yang dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor antara pemerintah, swasta dan masyarakat, berdasarkan hal tersebut telah dirumuskan visi Indonesia sehat 2010.

Visi Indonesia sehat tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-undang dasar 1945 berikut yaitu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dilaksanakan sistem pemerintahan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian pula salah satu kewenangan yang merupakan urusan wajib bagi kabupaten/kota yaitu tentang kesehatan.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, telah cukup mengalami kemajuan yang pesat diantaranya dengan meningkatnya cakupan imunisasi, cakupan air bersih, usaha perbaikan gizi, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat. Namun sampai saat ini tingkat kesehatan di Indonesia masih terhitung rendah dibanding dengan Negara tetangga. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, mutu tenaga kesehatan dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi biaya untuk kesehatan.

Saat ini banyak penyakit menular yang telah mampu diatasi bahkan ada yang dapat dibasmi berkat kemajuan teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan biologis yang erat hubungannya dengan penyakit menular. Akan tetapi masalah penyakit menular masih tetap dirasakan oleh sebagian besar penduduk negara berkembang dan negara maju. Kemajuan ilmu dan teknologi juga ikut mempengaruhi lingkungan sosial budaya dan erat hubungannya dengan pola tingkah laku masyarakat. Perubahan lingkungan sosial budaya tersebut memberikan dampak positif dan negatif terhadap pola penyakit yang ada dalam masyarakat, termasuk penyakit menular.

Dengan berbagai macam penyakit menular yang telah berkembang di masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, dan saat ini penyakit menular yang sangat mengkhawatirkan masyarakat adalah penyakit HIV/AIDS. Tidak hanya di negara lain, saat ini Indonesia juga sangat

dikhawatirkan oleh penyakit ini, selain penyebaran virus penyakit ini sangat cepat, dalam penanganannya juga butuh perhatian khusus dan sampai saat ini belum didapatkan obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini secara menyeluruh.

Data Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, jumlah penderita HIV/AIDS DI Indonesia dilaporkan hingga Juni 2014, HIV berjumlah 142.950 Jiwa dan AIDS berjumlah 55.623 Jiwa. Jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi terjadi di Provinsi Papua dengan jumlah penderita HIV mencapai 15.686 Jiwa dan AIDS mencapai 10.184 Jiwa sedangkan jumlah penderita HIV/AIDS terendah terjadi di provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penderita HIV berjumlah 39 Jiwa dan AIDS berjumlah 6 Jiwa. Sedangkan Kalimantan Timur saat ini menduduki posisi ke 24 dari 34 provinsi dengan jumlah penderita HIV 2.437 Jiwa dan AIDS 332 Jiwa.

Saat ini kondisi penderita HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Timur sudah sangat mengkhawatirkan, ditambah lagi kurang maksimalnya penanggulangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Begitu pula yang terjadi saat ini di Kabupaten Penajam Paser Utara, kurangnya tingkat perhatian pemerintah terhadap penyakit ini semakin memperparah dan meningkatkan penyebaran penyakit HIV/AIDS ini. Ditambah lagi sampai saat ini belum ada kejelasan dalam pembentukan Komisi Penanggulangan Aids (KPA) sehingga masalah ini masih ditangani sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Saat ini penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara ibarat Fenomena Gunung Es yang terlihat diatas sangat kecil tetapi pada kenyataannya tingkat penularannya sangat besar. Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait penyakit ini.

Dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan dari data yang diperoleh saat ini tercatat 27 kasus HIV/AIDS, Dinas Kesehatan dinilai belum mampu melaksanakan penanggulangan secara maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pendukung lainnya.

Dari Fenomena inilah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **"Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara"**

Rumusan Masalah

Dari fenomena yang diuraikan di latar belakang penelitian, maka permasalahan yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Apa saja yang menjadi kendala Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Sebagai sumber informasi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian mengenai Penanggulangan HIV/AIDS disemua lapisan masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan khususnya aparatur dalam melaksanakan program dan menjadi bahan masukan bagi Pemeintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan berkaitan dengan Penanggulangan HIV/AIDS.

KERANGKA DASAR TEORI

Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2010) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Adapun Peran menurut Friedman, M (1998:286) adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Selain itu W.J.S. Poerwadarminta (1985) menjelaskan Peran berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan
- 4) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan

5) Pelaksanaan pengelolaan UPTD

Dalam hal penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi sasaran utama Dinas Kesehatan menurut pengaturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2013 meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.

Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:

- 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru
- 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS
- 3) Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS)
- 4) Meningkatkan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV/AIDS)
- 5) Mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat

Penanggulangan HIV/AIDS

Dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan, demi terciptanya kualitas manusia yang diharapkan, perlu peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS, yang melibatkan semua sektor pembangunan melalui program yang terarah, terpadu dan menyeluruh.

Prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS.

1. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia.
3. Setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial yang mengakar dalam masyarakat.
4. Pencegahan HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang baik dan mengubah perilaku yang berisiko tinggi.
5. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV

Definisi Konsepsional

Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengurangi penyebaran virus HIV di Kabupaten Penajam Paser Utara baik melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kemudian melakukan pencegahan serta pengobatan terhadap ODHA yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2003:21) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.

Sebagaimana jenis penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan peran dinas kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menangani penyebaran virus HIV/AIDS melalui :
 - 1) Pencegahan
 - 2) Pengobatan dan Rehabilitasi
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber dan Jenis Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penunjang informan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono (2002:62) bahwa *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang yang berkompeten dalam menguasai bidang tertentu sehingga data atau informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Matthew. B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:19) yang meliputi empat komponen yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data (Penyederhanaan Data)

3. Penyajian Data
4. Menarik Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Paser, Secara Formal terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 pada Tanggal 10 April 2002 tentang “Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara”, Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 00048’29” - 01036’37” Lintang Selatan dan 116019’30” - 116056’35” Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Loa Kulu dan Loa Janan Kab. Kukar
- Sebelah selatan : Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser
- Sebelah Timur : Samboja, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.
- Sebelah Barat : Bongan Kab. Kubar dan Long Kali Kabupaten Paser.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah ±3.333,06 km² dengan komposisi daratan 3.060,82 km² serta lautan 272,24 km², Kecamatan Penajam merupakan kecamatan terluas (1.207,73 km²) diikuti oleh Kecamatan Sepaku (1.172,36 km²), Kecamatan Waru (553,88 km²) dan Kecamatan Babulu (399,45 km²). (data Tahun 2013).

Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di bentuk melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah SK Gubernur No 21/2003 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam pembangunan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai salah satu perangkat pelaksana daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, Dinas Kesehatan

memiliki visi “Terwujudnya Penajam Paser Utara Sehat, Sejahtera dan Mandiri 2018

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya susunan organisasi Dinas Kesehatan Kab. PPU diatur berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 267 tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas daerah. Dinas Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan.

b) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesmas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas kesehatan masyarakat meliputi pengendalian dan pemberantasan penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan lingkungan.

c) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian dan pemberantasan penyakit

Upaya Pencegahan Penyebaran Virus HIV / AIDS

Upaya Dinas Kesehatan dalam Pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mencegah penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dilakukan guna mengurangi resiko penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan bisa melalui sosialisasi-sosialisasi dan survei-survei langsung ke tempat-tempat bersiko agar mampu mengurangi tingkat penyebaran penyakit ini.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang belum maksimal dijalankan dilihat dari penjelasan beberapa narasumber yang menjelaskan bahwa masih banyak kekurangan-

kekurangan yang dimiliki sehingga program-program yang dicanangkan belum bisa terlaksana secara maksimal.

Upaya Pengobatan/Rehabilitasi

Upaya Dinas Kesehatan dalam pengobatan/rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengurangi tingkat kematian di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS, karena diketahui bahwa saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan secara menyeluruh virus penyakit HIV/AIDS ini. Namun diharapkan pengobatan bisa dilakukan secara maksimal sehingga ODHA (orang dengan HIV/AIDS) masih bisa bertahan hidup dengan kondisi yang baik.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Upaya dalam pengobatan penderita ODHA di Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan, karena kondisi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki Klinik Voluntary Counseling dan Testing (VCT) sehingga pemberian obat masih didistribusi dari Kota Balikpapan.

Kendala Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengurangi penyebaran virus HIV di Kabupaten Penajam Paser Utara baik melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kemudian melakukan pencegahan serta pengobatan terhadap ODHA yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa dilaksanakan secara maksimal baik itu dalam hal pencegahan maupun pengobatan/rehabilitasi karena berbagai macam kendala dikarenakan berbagai hal seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan di Kantor Dinas Kesehatan.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal, karena berbagai macam kendala yang dihadapi, baik itu dana yang sangat minim, kemudian belum adanya Klinik VCT serta Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) yang mengatur mengenai HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini belum terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki sehingga program-program sosialisasi maupun survei-survei belum bisa dilaksanakan dengan rutin. Selain itu, tidak adanya PERDA maupun PERBUP mengenai penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara, kurangnya fasilitas memadai seperti tidak adanya Klinik VCT menyebabkan pencegahan secara dini belum mampu dilaksanakan dengan baik. Kemudian, sumber daya manusia yang masih kurang juga menjadi salah satu penghambat dalam mengoptimalkan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pengobatan/rehabilitasi terhadap ODHA di Kabupaten Penajam Paser Utara belum bisa dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Karena saat ini kondisi Dinas Kesehatan hanya sebagai fasilitator dalam pendistribusian obat, karena belum ada memiliki fasilitas yang memadai sehingga obat yang diberikan kepada ODHA yaitu ARV masih didistribusi dari Balikpapan. Kemudian pendampingan yang diberikan kepada ODHA belum bisa dilaksanakan dengan baik karena sumber daya manusia yang memahami secara mendalam mengenai penyakit HIV/AIDS masih sangat kurang sehingga penanganan yang diberikan terhadap ODHA belum maksimal.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya adalah anggaran yang diberikan dalam penanganan penyakit HIV/AIDS sangat minim sehingga menghambat seluruh program-program Dinas Kesehatan, kemudian tidak adanya PERDA maupun PERBUP yang mengatur hal ini sehingga pemberantasan HIV/AIDS belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, belum adanya Klinik VCT yang merupakan jendela awal untuk mengetahui penyebaran virus HIV/AIDS sehingga pencegahan secara dini belum mampu dilaksanakan.

Saran

Sesuai dengan penelitian dan kesimpulan maka penulisan memberikan saran sebagai berikut :

1. Saat ini penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat sehingga diperlukan perhatian yang khusus dari pemerintah baik itu dalam pemberian anggaran maupun pembuatan PERDA atau PERBUP sehingga upaya penanggulangan bisa dilaksanakan secara maksimal karena memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pemerintah harus segera mendirikan Klinik VCT di daerah agar pencegahan secara dini bisa dilaksanakan karena melihat kondisi penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Penajam Paser Utara cukup memprihatinkan.
2. Pengobatan/rehabilitasi terhadap ODHA harus terus ditingkatkan dengan melihat jumlah ODHA saat ini, diperlukan fasilitas yang memadai agar pendistribusian obat bisa dilakukan di daerah sendiri, sehingga waktu

pemberian bisa lebih efisien. Kemudian pendampingan terhadap ODHA perlu diintenskan agar psikologis ODHA tetap stabil sehingga tidak ada perasaan didiskriminasi dan dikucilkan dari masyarakat. Kemudian diperlukan penambahan sumber daya manusia yang menangani penyakit HIV/AIDS ditambahkan agar bisa lebih maksimal.

3. Saat ini stigma dan diskriminasi terhadap ODHA di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat tinggi, sehingga Dinas Kesehatan diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan survei-survei secara rutin dan terus menerus agar stigma dan diskriminasi ini bisa dihilangkan.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Petrus. 2012. *AIDS dan Penyakit Kelamin Lainnya*. Jakarta : Archan
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Penelitian Deskriptif Kualitatif* , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hutapea, Ronald. 1995. *AIDS dan PMS*. Jakarta : TP.Rineka Cipta
- Loftland dan Loftland Dalam Moleong, 2003 *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Balai Aksara – Yudhistira dan Pusataka Saadiyah, Kudus
- Mathew B. Miles I dan Michael Huberman (dalam Satori 2009), *Analisis Data Model Interaktif* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Pidi.2012.*Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2013*.Jakarta
- Sangkala.2012.Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.Jakarta
- Soekamto,Soerjono.2010.*Sosiaologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiono 2002, *Prosedur Penelitian Puprosive Sampling*.Penerbit Andi, Yogyakarta
- Wijaya, Desy.2012.*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.Laksana.Jogjakarta

Dokumen :

- Keputusan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- . Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- . Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi

Sumber Internet:

www.worldhealtorganiztaion.com

www.penajam.co.id

[http://m.kompasiana.com/post/read/kasus_hiv/aids_yang_tercatat_di_indonesia_sampai_juni_2014_\(di_akses_pada_tanggal_25_juni_2014\)](http://m.kompasiana.com/post/read/kasus_hiv/aids_yang_tercatat_di_indonesia_sampai_juni_2014_(di_akses_pada_tanggal_25_juni_2014))